

B A B IV

INTEGRASI KEKUATAN POLITIK ISLAM

Kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973-1984

A. Partai-partai Sebagai Unsur.

Partai Persatuan Pembangunan adalah ujud integrasi dari empat partai politik Islam, yaitu Partai Islam NU., Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).¹ Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keempat partai itu, maka disini akan dijelaskan secara singkat mulai dari berdirinya sampai berintegrasi kedalam Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Islam NU..

Nahdlatul Ulama pada awal berdirinya adalah merupakan organisasi sosial-keagamaan dengan sebutan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Adapun faktor yang mendorong berdirinya organisasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah timbulnya keperluan yang mendesak bagi kaum penganut madzhab untuk melembagakan persatuan di antara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan - gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa terutama yang dilancarkan Muhammadiyah.²

Kasus lain sebagai faktor internal adalah kasus tersingkirnya ulama Pesantren dari rombongan dele

¹Media Persatuan, No. 4 Tahun II - April 1986, - hal. 4.

²Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik, Yayasan Perhidmatan, Jakarta, 1984, hal. 5.

gasi ke Kongres Khilafat di Makkah dan usul mereka yang ditolak oleh anggota delegasi itu.³ Dengan kasus di atas, maka atas saran KH. Hasyim Asy'ari para ulama pesantren keluar dari keanggotaan Komite Khilafat dan membentuk panitia khusus yang disebut Komite Merembuk Hijaz.⁴ Langkah tersebut mendapat sambutan antusias dari kalangan ulama di Jawa, maka pada tanggal 31 Januari 1926 para ulama itu mengadakan pertemuan dengan mengambil dua keputusan, yaitu :

pertama; meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz.

kedua ; membentuk jamiyah (organisasi) untuk wadah persatuan ulama dalam tugasnya memimpin umat. Jamiyah itu diberi nama Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan para ulama.⁵

Adapun faktor eksternal yang mendorong berdirinya organisasi ini adalah :

pertama ; karena rasa tanggungjawab yang besar dari para alim ulama akan kemurnian serta keluhuran Agama Islam, mengingat kuatnya Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam demi kepentingan penjajahan dengan jalan infiltrasi - keagamaan.

kedua ; rasa tanggungjawab yang besar dari para alim ulama sebagai pemimpin untuk memeruskan

³Usul para ulama itu ialah agar delegasi yang akan berangkat ke Makkah itu mengusulkan kepada penguasa baru di Arab Saudi, agar tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlaku di sana dan ajaran-ajaran madzhab yang dianut oleh masyarakat Islam setempat. Sedangkan anggota delegasi itu adalah HOS Cokroaminoto (SI) dan H Mas Mansur (Muhammadiyah).

⁴Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1980, hal. 243.

⁵Slamet Effendi Yusuf dkk., Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 18-19.

perjuangan pahlawan Islam, yaitu perjuangan kemerdekaan tanah air dan bebas dari belenggu penjajah.

ketiga ; rasa tanggungjawab para alim ulama untuk memelihara ketentraman dan ketenangan bangsa Indonesia dengan memelihara patriotisme dan kebencian terhadap penjajah.⁶ Kemudian tujuannya adalah menegakkan syariat Islam dengan berhaluan salah satu dari empat madzhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali serta melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.⁷

Meskipun demikian, namun ketika perjuangan politik melawan Belanda makin banyak melibatkan golongan golongan di Indonesia dan apalagi kemudian organisasi harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan Belanda secara terus-menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan bangsa dan agama, maka organisasi ini banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Keterlibatan NU dalam kegiatan-kegiatan politik sebelum kemerdekaan dapat dilihat pada kasus penolakan NU terhadap rencana Pemerintah Hindia Belanda tentang pajak rodi bagi bangsa Indonesia, rencana ordonansi perkawinan tercatat, pembagian hak membagi waris, soal milisi dan dukungannya terhadap GAPI yang menuntut Indonesia berparlemen.⁸

⁶ Masbuchin, Nahdlatul Ulama di Tengah-Tengah Rakyat dan Bangsa Indonesia, Daya Bakti, Kebumen, hal.25.

⁷ Kementrian Penerangan, Kepartaian dan Parlemen-taria Indonesia, 1945, hal. 414.

⁸ I b i d., hal. 412-413.

Adapun setelah kemerdekaan dapat dilihat pada kasus keikutsertaan NU didalam Kongres Kaum Muslimin 7 Nopember 1945 di Yogyakarta, yang menyatakan berdirinya Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam, serta NU menduduki jabatan penting dalam partai itu. Namun ketika Kongres Masyumi di Yogyakarta pada akhir tahun 1949 memutuskan untuk merubah struktur kepengurusan sedemikian rupa, dimana Majelis Syura tidak lagi dijadikan badan legislatif disamping DPP, maka sejak saat itulah ulama-ulama NU mengambil langkah mundur.⁹ Dan akhirnya pada Kongres NU di Palembang tahun 1952, dinyatakan bahwa NU keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik independen.¹⁰

Pada Pemilu tahun 1955 NU berhasil menempatkan diri dalam kelompok empat besar disamping Masyumi, PNI dan PKI.¹¹ Setelah itu tokoh-tokoh NU banyak terlibat dalam perdebatan masalah dasar Negara di dalam sidang Konstituante. Kemudian ketika lembaga Konstituante - itu dibubarkan oleh Presiden Sukarno dan kekuasaan negara diambil alih olehnya, NU tampak begitu lengket dengan Sukarno/PKI, hal itu dapat dilihat pada keikutsertaan NU dalam Nasakom.¹² Namun ketika PKI memberontak pada tahun 1965, NU berada dalam barisan front Pancasila yang menentang PKI dan ikut serta mengikis habis PKI dan antek-anteknya. Dengan demikian NU ikut punya andil dalam proses lahirnya Pemerintah Orde Baru.

⁹ Ibid, hal. 412.

¹⁰ Mahrus Irsyam, Op. Cit., hal. 29-30.

¹¹ HA. Basit Adnan, Ada Apa di PPP ?, Mayasari, - Solo, hal. 7.

¹² KH. Ahmad Shiddiq, mengatakan bahwa pada waktu itu banyak orang menyindir "NU bermesraan dengan PKI dalam Nasakom". Lihat TEMPO, 23 Maret 1985, hal. 62-63.

Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan politik dalam perkembangan selanjutnya dibawah rejim Orde Baru tidak berbeda jauh dengan nasib kekuatan politik lainnya. Dia harus bertekuk lutut dibawah kebijaksanaan - Pemerintah Orde Baru tentang kepartaian, yaitu dia harus bergabung dengan kekuatan politik Islam lainnya dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan. Walaupun NU pada awalnya sempat menolak penggabungan partai-partai Islam itu, karena dikhawatirkan suatu saat menjadi minoritas. Tapi, NU dengan melihat perkembangan situasi yang terjadi akhirnya NU tidak menentang, bahkan NU mempunyai andil besar dalam proses lahirnya Partai Persatuan Pembangunan.¹³

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Partai ini merupakan perubahan terakhir dari SDI (Sarikat Dagang Islam) yang didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo, kemudian pada tahun 1912 berubah menjadi Sarekat Islam.¹⁴ Pada tahun 1923 berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), pada tahun 1927 berubah menjadi Partai Sarekat Islam Hindia Timur dan perubahan terakhir terjadi pada tahun 1930 menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

¹³Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Jatayu, Sala, 1985, hal. 268-269.

¹⁴Ada sekelompok orang yang dipelopori oleh Tamar Jaya yang mengatakan bahwa SDI lahir pada tahun 1905 dan berubah menjadi SI setahun kemudian (1906). Hal itu mereka dasarkan pada keterangan Haji Samanhudi pada tanggal 25 Juli 1955 dalam rangkaian acara menyambut peringatan ulang tahun setengah abad Pergerakan Islam Indonesia. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional seharusnya berdasarkan pada lahirnya SDI/SI, bukan pada lahirnya Budi Utomo, (1908). Keterangan selengkapnya, lihat Drs. MA. Gani, MA., Cita-Cita Dasar dan Pola Perjuangan Sarekat Islam Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan partai ini pada awalnya berdiri adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan Bangsa Tionghoa adalah merupakan suatu halangan buat perdagangan bangsa Indonesia (monopoli bahan-bahan batik) ditambah pula tingkah laku sombong bangsa Tionghoa sesudah revolusi di Tiongkok.
2. Kemajuan gerak langkah penyebaran agama Islam dan juga ucapan-ucapan yang menghina dalam parlemen negeri Belanda tentang tipisnya kepercayaan bangsa Indonesia.
3. Cara dat lama yang terus dipakai di daerah kerajaan Jawa, makin lama dirasakan sebagai penghinnaan.¹⁵

Perubahan SDI menjadi SI pada tahun 1912 tidak hanya sekedar ganti nama, tapi sejak saat itu mulai tampak bentuk corak dan haluan politiknya. Mulai tahun itu, tersusunlah program asas partai dan program kerjanya, dan pada tahun 1930 disempurnakan lagi.¹⁶ Namun demikian, pada Kongres SI tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya, HOS Cokroaminoto mengatakan bahwa SI bukanlah partai politik dan tidak beraksi melawan Pemerintah Belanda.¹⁷ Deliar Noer menilai ucapan HOS Cokroaminoto itu sebagai taktik untuk mempertahankan keberadaannya saja. Reorganisasi ini tidak disebut partai politik, karena adanya larangan untuk berkumpul dalam arti politis.¹⁸

¹⁵ AK. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1984, hal. 4.

¹⁶ Kementerian Penerangan, Op.-Cit., hal. 340.

¹⁷ AK. Pringgodigdo, Op. Cit., hal. 5.

¹⁸ Deliar Noer, Perkembangan Demokrasi Kita, Prisma, Pebruari 1977, hal. 18.

dengan demikian secara formal organisasi ini bukan partai politik, tapi dilihat perjuangannya dapatlah dikatakan sebagai partai politik.

Keanggotaan organisasi didasarkan atas kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan demikian S.I. adalah laksana satu badan penampung yang maha besar, karena segala lapisan masyarakat semuanya masuk tanpa ada paksaan.¹⁹ Keberadaan SI dengan kemajmukan anggotanya itu cukup membahayakan posisi Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pemerintah mengatakan bahwa suatu usaha frontal untuk menjatuhkan Sarekat Islam akan menimbulkan amarah rakyat.²⁰

Kemajmukan itu disisi lain telah menyulitkan perkembangan selanjutnya, yaitu karena terjadi perpecahan-perpecahan diantara mereka. Perpecahan pertama terjadi pada tahun 1923, ketika SI Merah dari unsur Marxis keluar dan menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia dan sekaligus menjadi saingan berat bagi SI.²¹ Perpecahan selanjutnya terjadi pada tahun 1932, yaitu ketika Dr. Sukiman dan kawan-kawannya keluar dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PARII), kemudian pada tahun 1936 Haji Agus Salim keluar dan

¹⁹ Dalam SI itu bergampur-aduk manusia yang berideologi Komunis, Sosialis, Islam, yang berfaham Borjuis, yang berfaham sama rata sama rasa, yang merah semerahnya, yang fanatik agama sefanatik-fanatiknya. Mereka bersatu tidak karena propaganda, tapi karena paksaan, tidak karena terikat kawan, tapi semata-mata keinginan mereka hendak mencari obat penawar hati menyembuhkan penyakit hati untuk dijadikan bekal ber sama dalam perjuangan bangsa seluruhnya.

²⁰ George Mc.Turnan Kahin, Nasionalisme and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, London, 1970, hal. 69.

²¹ Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 74.

mendirikan partai baru yang diberi nama PENYEDAR.²² Pemisahan yang tampak lebih radikal terjadi pada tahun 1937 yang dipimpin oleh Sukarmadji Kartosuwiryo dengan mendirikan Komite Pembela Kebenara PSII, yang akhirnya gerakan ini mengarah kepada gerakan DI/TII yang dipimpinnya.²³

Ketika terbentuknya Masyumi pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta, partai ini juga tidak ketinggalan mendukungnya, namun berselang dua tahun kemudian menyatakan keluar dan berdiri sebagai partai politik independen. Dalam pemilu 1955 partai ini memenangkan 8 kursi DPR dan 16 kursi di Konstituante - dan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, partai ini mendapatkan 5 kursi dalam DPRGR dan ketua Dewan Partai Arudji Kartawinata menjabat sebagai ketua DPRGR. Peranan PSII mulai mundur setelah G 30 S / PKI, beberapa kericuhan muncul dalam partai itu yang mengecam kebijaksanaan pimpinannya. Kemudian, sesuai dengan ketetapan MPR No. IV Tahun 1973, PSII mengadakan fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Fusi PSII ke dalam Partai Persatuan Pembangunan adalah atas kebijaksanaan Anwar Cokroaminoto sebagai pimpinan PSII yang mengambil alih kepemimpinan M. Ch. Ibrahim, dan Bustaman SH, dimana mereka berdua menolak fusi partai-partai Islam.²⁴

²²Hasan Sadely, Ensiklopedi Indonesia 5, Ikhtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1984, hal. 2785.

²³Untuk lebih jelasnya lihat C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.

²⁴T E M P O, 13 Juli 1985, hal. 18. Umaid Raddi, Strategi PPP, hal. 80-82. Fachri Aly dan Iqbal Abdurrauf Sainima, Merosotnya Aliran Dalam PPP, Seri Prisma I, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 231-232.

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada awal berdirinya adalah merupakan organisasi sosial yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran agama serta ilmu umum, membantu fakir miskin dan menggalakkan tolong menolong. Namun dalam keadaan tertentu yang menghendaki, baru melibatkan diri dalam masalah politik terutama pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Adapun sejarah berdirinya organisasi ini adalah bersumber dari kalangan ulama Islam madzhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah dari Sumatera Barat.²⁵ Para ulama itu mempunyai surau (di Jawa sama dengan Pesantren) dengan sistim pengajaran yang sama dengan pondok di Jawa. Kemudian karena pengaruh kemajuan jaman, pesantren tersebut dibentuk menjadi sekolah moderen dengan nama Arabiyah School di Padang Laras pada tahun 1918. Pada tahun 1928 didirikan persatuan sekolah-sekolah agama dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah, kemudian dari situ terbentuklah persatuan orang tua murid dalam organisasi sosial, dengan demikian berdirilah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada tanggal 30 Mei 1930.²⁶

Adapun organisasi ini bertujuan untuk Kalimat-Allah Hiyal Ulya (ketinggian agama Islam) dalam arti yang luas, hal itu dapat dilihat pada program Perjuangan dan usaha-usahanya.²⁷ Organisasi ini dijadikan

²⁵ Hasan Sadely, Op. Cit., hal. 2688.

²⁶ I b i d.

²⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Partai Islam Perti dalam Kementerian Penerangan, Op. Cit., hal. 434-437.

partai politik setelah kemerdekaan, yaitu tepatnya - tanggal 22 Nopember 1945 pada waktu sidang pleno Pengurus Besar di Bukit Tinggi.²⁸ Ketika semua kekuatan politik beramai-ramai menghadiri Kongres Umat Islam di Yogyakarta untuk membentuk Partai Politik - Islam Masyumi, Perti tidak ikut mendukungnya.²⁹

Dalam Pemilihan Umum 1955 Perti memenangkan 4 kursi DPR dan 7 kursi di dalam Konstituante, sedangkan utusan yang duduk di DPR adalah Haji Sirodjuddin Abbas dan DT. Bandaharo. Dalam DPRGR yang dibentuk Presiden Sukarno setelah DPR dan Konstituante dibubarkan, Perti mendapatkan dua kursi. Kemudian pada Pemilihan Umum 1971 Perti juga mendapatkan dua kursi setelah itu Perti bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan.³⁰

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai Muslimin Indonesia didirikan pada tanggal 7 April 1967, yang pertama kali dipimpin oleh Djarnawi Hadikusumah sebagai ketua umum dan Drs. Lukman Harun sebagai Sekretaris Jendral. Berdirinya Parmusi ini didukung oleh 16 organisasi sosial non-politik yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan dakwah dan profesi. Organisasi-organisasi - itu adalah eks anggota Masyumi yang tidak mau menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik yang ada. Untuk lebih jelasnya lihat bab III.

²⁸ Rusli Karim, Op. Cit., hal. 75.

²⁹ Syafii Maarif mengatakan, tidak ikutnya Perti dalam Masyumi disebabkan kondisi Sumatera Barat, dimana unsur modernis Islam begitu dominan dalam pembentukan partai baru itu, sedangkan kelahiran Perti adalah reaksi terhadap move-move kelompok moderenis tersebut. Lihat Islam dan Masalah Kenegaraan, hal. 111.

³⁰ Hasan Sadely, Op. Cit., hal. 2689.

B. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan.

Munculnya Orde Baru telah membawa warna baru bagi kehidupan politik di Indonesia. Issu perlunya pembaharuan politik sebagai koreksi total terhadap kekeliruan yang telah dilakukan Pemerintah Orde Lama dalam menata dan membina negeri ini adalah merupakan topik yang hangat dibicarakan. Kekeliruan yang tampak selama Pemerintah Orde Lama telah membawa bangsa ini terperosok ke dalam suatu kegiatan untuk bersengketa dan mencari penyelesaiannya, sebagai resiko dianutnya sistim banyak partai.³¹ Jumlah partai yang banyak sangat memberi peluang timbulnya konflik antara partai-partai itu secara legal, disamping juga akan menyulitkan bagi Pemerintah untuk mengontrol kehidupan partai. Hal itulah yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Lama.

Pemerintahan Orde Baru sebagai pengoreksi total terhadap kekeliruan Pemerintah sebelumnya, telah mengadakan pembaharuan kehidupan kepartaian dengan jalan menyederhanakan jumlah partai. Penyederhanaan partai itu dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas politik demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Tanpa stabilitas yang mantap, apapun rencana pembangunan yang dicanangkan sulit untuk berhadil. Maka dari itu Pemerintah Orde Baru bertekad melaksanakan penyederhanaan partai.

³¹ Fachry Ali dan Iqbal Abdurrauf Saimina, Merosotnya Aliran Dalam Partai Persatuan Pembangunan, dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilahan Ertikel Prisma Seri I, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 228-229.

Presiden sebagai Mandataris MPR telah mengambil prakarsa untuk mendorong terciptanya suasana yang memungkinkan terciptanya penyederhanaan kepartaian, keormasan³² dan kekaryaan.³³ Prakarsa Presiden itu berupa anjuran untuk mengadakan pengelompokan partai-partai menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari partai-partai Spiritual/Material, yang menitikberatkan program-program spiritual tetapi tidak mengabaikan material. Kelompok kedua terdiri dari partai-partai Material/Spiritual, yang menitikberatkan program-programnya pada pembangunan material, tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual. Kelompok ketiga adalah kelompok Karya.³⁴ Menurut Presiden dasar pengelompokan itu sama sekali bukan untuk menghapuskan partai-partai, tetapi semata-mata untuk memudahkan administrasi seperti penyusunan fraksi dalam DPR dan sebagainya.

Dalam posisi yang sulit, antara mendukung segala gagasan Pemerintah Orde Baru dan keinginan mempertahankan eksistensinya maka partai yang ada tampaknya memilih mengikuti arus perkembangan politik tersebut, yaitu menerima anjuran Pemerintah. Maka akhirnya dengan segera terbentuklah pengelompokan partai-partai

³²Drs. CST. Kamsil, SH. mengatakan bahwa lahirnya partai Muslimin Indonesia memberikan wadah yang legal bagi mereka yang tergabung dalam banyak organisasi-organisasi Islam yang sesungguhnya melakukan kegiatan politik. Dengan demikian, maka sesungguhnya telah berlangsung proses penyederhanaan kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, lihat: Parpol dan Golkar, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 40.

³³Terciptanya proses penyederhanaan itu tampak lebih lancar dan tepat dalam struktur dan tatakerja Golkar. Dalam Pemilu 1971 Golkar yang semula terdiri lebih dari 200 organisasi karya, telah keluar dengan satu tanda gambar saja.

³⁴Umaid Radi, Strategi PPP, Integrita Press, Jakarta, 1984, hal. 76.

dalam tiga gabungan, yaitu kelompok Persatuan Pembangunan yang menjadi fraksi Persatuan Pembangunan dan merupakan gabungan empat partai politik Islam (NU, PSII, Perti dan Parmusi). Kelompok Demokrasi Pembangunan yang menjadi fraksi Demokrasi Pembangunan dan merupakan gabungan dari partai-partai : PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba. Kelompok Karya Pembangunan yang menjadi fraksi Karya Pembangunan, yang terdiri dari Golongan Karya ditambah Golongan Karya yang diangkat.³⁵ Dengan demikian di dalam DPR hanya ada fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi Demokrasi Pembangunan, fraksi Karya Pembangunan dan ditambah lagi fraksi ABRI.³⁶

Langkah strategis selanjutnya yang diambil Pemerintah adalah memanfaatkan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 untuk menyusun rencana undang-undang kepartaian. Dalam rencana undang-undang tersebut dinyatakan bahwa di Indonesia hanya akan diakui adanya tiga partai politik saja, sehingga dalam pemilihan umum yang akan datang (1977) akan diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Konsep rencana undang-undang tersebut dibahas oleh DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.³⁷

³⁵ I b i d., hal. 76-77.

³⁶ Duduknya anggota ABRI dalam DPR tanpa melalui proses Pemilihan Umum adalah merupakan paket dari Pemerintah yang bertujuan untuk mengawal Pancasila dan UUD '45 agar terhindar dari usaha-usaha yang akan menggantikan dengan yang lain, sebagaimana pernah terjadi pada masa Pemerintah sebelumnya.

³⁷ Undang-Undang No. 3/Tahun 1975, yang mengakui hanya ada tiga kekuatan sosial/politik di Indonesia - dan ketiga kekuatan sosial/politik itulah yang berhak mengikuti Pemilihan Umum selanjutnya.

Di sini perlu dikemukakan beberapa pandangan dari berbagai kalangan tentang perlu tidaknya partai-partai yang ada diperkecil jumlahnya atau digabungkan seperti yang dikehendaki Pemerintah di atas. Di sini akan dikemukakan pandangan dari pihak ABRI (Pemerintah) dan juga dari pihak partai sendiri yang akan mengalami khususnya dari partai-partai Islam. Di pihak ABRI sendiri terdapat dua pemikiran tentang perlu tidaknya partai-partai Islam disatukan menjadi satu partai.

Beberapa pemikiran dikalangan ABRI menyarankan kepada Pemerintah agar partai-partai Islam jangan disatukan dalam satu partai, karena dikhawatirkan dikemudian hari akan menjadi balik memukul dan akan menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI.³⁸ Oleh karena itu biarkanlah partai-partai Islam terbagi-bagi seperti adanya, paling jauh mereka disatukan dalam satu federasi yang longgar.³⁹ Dengan demikian kekuatan Islam tidak akan menjadi kekuatan yang berarti dan tetap selalu lemah. Adapula pemikiran yang berpendapat bahwa sebaiknya partai-partai Islam disatukan kedalam satu wadah, dengan demikian kekuatan Islam akan lebih mudah dikontrol dan dikuasai. Dengan satu partai Islam berarti akan memperkecil front, sehingga menghemat energi dalam mengawasi tingkah lakunya.⁴⁰

Menghadapi usaha Pemerintah untuk menggabungkan partai-partai Islam itu kedalam satu partai, maka dikalangan partai-partai Islam itu sendiri terdapat tiga

³⁸ M. A. Radi, Op. Cit., hal. 79.

³⁹ I b i d.,

⁴⁰ I b i d.

macam pemikiran mengenai penggabungan partai itu. Pemikiran pertama dari kalangan NU yang secara formal menolak penggabungan partai-partai Islam menjadi satu partai.⁴¹ Pemikiran kedua datang dari kalangan PSII yang juga menolak penggabungan partai-partai Islam. Penolakan itu merupakan langkah kebijaksanaan dari pimpinan pusat PSII yang baru,⁴² kemudian langkah selanjutnya adalah mengeluarkan instruksi no.193 tanggal 18 Oktober 1972.⁴³ Adapun pemikiran ketiga datang dari kalangan Parmusi dan Perti yang menghendaki segera dilakukannya penggabungan partai-partai Islam kedalam satu partai Islam baru. Dasar pertimbangannya, karena hal itu sesuai dengan cita-cita dan semangat ukhuwah Isla-

⁴¹ Keputusan penolakan itu diambil dalam Kongresnya di Surabaya tahun 1972, karena dikhawatirkan suatu saat NU bisa menjadi minoritas. Padahal dalam kenyataannya NU adalah terbesar kedua setelah Golkar. Hal itu dapat dilihat pada hasil Pemilu 1971, tapi dalam pelaksanaannya, NU melihat perkembangan situasi sehingga dalam proses penggabungan itu NU tidak menentang bahkan NU cukup punya andil dalam proses lahirnya PPP.

⁴² Pimpinan Pusat PSII yang baru itu terpilih dalam Kongresnya yang ke-33 pada bulan Juni 1972 di Majalaya Jawa Barat. M. CH. Ibrahim terpilih sebagai ketua umum Lajnah Tanfidziyah dan Bustaman, SH terpilih sebagai ketua Dewan Pusat. Kedua pimpinan PSII itu dituduh anti fusi. Lihat, TEMPO, 13 Juli 1985, hal. 18.

⁴³ Instruksi itu isinya dalah melarang wilayah-wilayah dan cabang-cabang PSII menghadiri semua pertemuan yang akan membicarakan masalah fusi, bagi yang sudah terlanjur supaya mengundurkan diri. Tindakan pimpinan PSII itu menimbulkan pergolakan sehingga dibentuklah "Team Penyelamat PSII" yang dipimpin oleh MA. Ghandi, Gobel dan kawan-kawannya. Setelah diadakan perundingan antara pimpinan hasil Kongres Majalaya dan Team itu, akhirnya terbentuklah susunan pengurus PSII dibawah pimpinan Anwar Cokroaminoto. Pimpinan PSII dibawah Anwar Cokroaminoto menyetujui kebijaksanaan untuk bergabung dalam partai politik baru bersama NU, Parmusi, dan Perti. Lihat, Umaid Radi, Op. Cit., hal. 80-82.

miyah yang selalu menganjurkan untuk bersatu dan bermusyawarah, jangan bercerai berai.

Setelah melalui serangkaian musyawarah diantara pimpinan keempat partai Islam itu, maka pada pertemuan tanggal 5 Januari 1973 di rumah Mintareja dinyatakan - penggabungan partai-partai politik Islam dalam satu - partai baru. Pernyataan penggabungan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Deklarasi Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan. Didalam Deklarasi itu dinyatakan bahwa empat partai politik Islam (NU, PSII, Perti dan Parmusi) telah seia-sekata untuk menggabungkan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian segala kegiatan yang bukan politik tetap dikerjakan dan dilaksanakan oleh organisasi masing-masing sebagaimana sedial kala.⁴⁴

Masalah yang sempat menimbulkan beda pendapat dalam proses pembahasan penggabungan itu adalah permasalahan apa nama partai yang merupakan gabungan empat partai Islam itu. Usul yang datang dari interen partai diantaranya agar partai baru tersebut diberi nama Partai Persatuan Islam Indonesia, Partai Persatuan Muslimin Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Dari nama-nama yang diusulkan itu masih tampak kata-kata Islam dan Muslimin, sedangkan Pemerintah menghimbau agar dalam nama partai baru itu tidak usah mencantumkan kata Is-

⁴⁴Disarikan dari Deklarasi Pembentukan Persatuan Pembangunan yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 1973 oleh Presidium Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari KH.DR. Idham Khalid (NU), H.M. Mintareja, SH. (Parmusi), H. Anwar Cokroaminoto (PSII), Rusli Karim (Perti) dan KH. Masykur (NU).

lam. Tapi, sebaliknya lebih mencerminkan semangat pembangunan, lebih menonjolkan aspek-aspek keagamaan atau aspek-aspek emosional lainnya.

Akan tetapi setelah melalui pembahasan-pembahasan dengan pertimbangan masalah-masalah di atas, maka akhirnya disepakati nama Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana diusulkan oleh Lukman Harun untuk nama kelompok dalam DPR.⁴⁵ Ada dua keuntungan dengan nama itu, pertama sudah dikenal dalam DPR, kedua memenuhi harapan dan himbuan Pemerintah serta terlihat pula semangat pembangunan.

Penggabungan keempat partai Islam itu, secara teknis organisatoris belumlah matang, hal itu disadari oleh semua unsur bahwa Deklarasi Penggabungan itu hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan sesaat.⁴⁶ Beberapa pertimbangan sesaat itu ialah : pertama, mendahului kelompok Demokrasi Pembangunan yang rencananya akan mengadakan penggabungan pada tanggal 10 Januari 1973. Dengan demikian secara politis kelompok persatuan Pembangunan tidak ketinggalan dalam memberikan respon positif terhadap himbuan Pemerintah. Kedua, goncangan psikologis diantara para pemimpin keempat partai Islam sebagai akibat kekalahannya pada Pemilu 1971, telah menimbulkan semangat persatuan. Ketiga, mendahului rencana undang-undang kepartaian yang akan diajukan Pemerintah ke DPR, karena dalam RUU itu dinyatakan akan diadakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah partai. Keempat, untuk memusatkan perjuangan dalam DPR

⁴⁵ Slamet Effendi Yusuf dkk., Op. Cit., hal. 58.

⁴⁶ Umaid Radi, Op. Cit., hal. 85.

dimana hal itu akan lebih bermakna bagi perjuangan partai di masa mendatang.⁴⁷

Adapun tujuan Partai Persatuan Pembangunan dapat dilihat didalam anggaran dasarnya, yaitu sebagai berikut : Pertama, mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam UUD 1945 dan Islam.⁴⁸ Kedua, menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah swt. spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD '45 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.⁴⁹

Dari uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan sebagai gabungan empat partai Islam, adalah terjadi dalam kondisi yang memaksa dan belum matang.⁵⁰ Dalam arti bahwa langkah penggabungan itu terpaksa dilakukan karena usaha Pemerintah menciutkan jumlah partai yang ada banyak mendekati keberhasilan, hal itu disebabkan pula karena kondisi partai-partai itu semakin lemah. Dikatakan belum matang karena partai-partai itu sendiri masih berbeda pandangan tentang perlu tidaknya pengga-

⁴⁷I b i d., hal. 86.

⁴⁸Setelah Pemerintah mempunyai gagasan penyeragaman asas tunggal Pancasila bagi semua kekuatan sosial politik yang kemudian dikuatkan dengan keputusan MPR Nomer II / MPR / 1983, akhirnya Partai ini menghilangkan asas Islamnya. Hal itu dapat dilihat pada Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yang baru.

⁴⁹Hasan Sadely, Op. Cit., hal. 2759.

⁵⁰Syarifuddin Harahap mengatakan bahwa sesungguhnya fusi itu dilaksanakan dalam suasana belum matang, Keputusan untuk fusi semata-mata hanya untuk memanfaatkan momentum. Fusi itu diakui baru dilaksanakan dari atas, bukan dari bawah, sehingga berpengaruh pada perkembangan dan kehidupan partai. Dikutip dari Umaid Radi, Strategi PPP, hal. 84.

bungan itu dilakukan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian benar kata orang bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu matang karena dikarbit, serta sejak berdirinya sudah banyak terdapat benih-benih perselisihan dan perpecahan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam partai itu dalam perkembangan selanjutnya.

C. Sejarah Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan.

Walaupun proses pembahasan penggabungan keempat partai Islam itu banyak diwarnai perbedaan pendapat, namun ketika berintegrasi mereka menunjukkan semangat ukhuwah Islamiyah dan penuh kekompakan. Sehingga, pada awal terjadinya telah menghembus angin segar bagi masa depan umat Islam Indonesia dalam percaturan politik di negeri ini. Kekompakan para pemimpin partai itu betul-betul terjalin dengan baik, sehingga mereka tampil dalam gelanggang politik secara kompak dan cukup memuaskan umat.

Kekompakan itu, tidak hanya terjadi diantara pemimpin yang ada di DPR, tetapi juga disegenap jajaran partai dan seluruh kekuatan sosial politik umat Islam, terutama pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam. Hal itu bisa dilihat pada kasus perjuangan kelompok PPP di DPR tentang RUU perkawinan.⁵¹ Dimana dalam proses pem-

⁵¹ RUU Perkawinan itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Penelitian IAIN Sunan Kalijogo ada 14 pasal dalam RUU Perkawinan tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu contoh adalah pasal 49, melembagakan pertunangan dan memberinya status hukum. Yang serius adalah anak hasil pertunangan bisa menjadi anak yang sah dengan suatu cara tertentu. Pihak Islam menganggap pasal ini melegalsir hubungan diluar nikah dan mendorong perbuatan zina, lihat TEMPO, 8 September 1973, hal. 10.

bahasannya telah menimbulkan perdebatan yang hangat dan suasana yang tegang dalam masyarakat, sehingga banyak para pelajar dan mahasiswa mengadakan demonstrasi masuk gedung DPR untuk menyatakan dukungannya pada kelompok PPP.⁵²

Suasana ukhuwah Islamiyah antara kelompok-kelompok Islam yang digalang melalui PPP, betul-betul menumbuhkan citra positif bahwa PPP adalah milik mereka, peyalur aspirasi politiknya serta alat perjuangan cita-cita mereka, "izzul Islam wal Muslimin", dan untuk membangun bangsa dan negara ini. Sehingga dukungan dan kegairahan mereka terhadap PPP cukup menonjol, yang pada akhirnya menjadikan PPP sebagai kekuatan politik yang potensial dan kompak. Jika dalam Pemilu 1971 seluruh parpol Islam meraih 94 kursi DPR, maka dalam Pemilu 1977 PPP meraih 99 kursi dan Golkar mengalami kemerosotan 4 kursi dan PDI kehilangan 1 kursi.⁵³

Kebersamaan di dalam PPP antara pemimpin keempat partai Islam itu cukup dirasakan manfaatnya, oleh sebab itu segala sesuatu yang akan menimbulkan perselisihan diantara mereka dapat dicegah. Berkat kebersamaan itu, PPP cukup berhasil dalam ikut ambil bagian dalam memproses lahirnya berbagai undang-undang Perkawinan, undang-undang larangan perjudian, Undang- Undang

⁵² Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, Jakarta, 1981, hal. 264.

⁵³ Seluruh hasil Partai Islam dalam Pemilu 1971 sebanyak 94 kursi, kemudian dalam Pemilu 1977 sebanyak 99 kursi. Seluruh hasil partai sebagai unsur PDI dalam Pemilu 1971 sebanyak 30 kursi, kemudian dalam Pemilu 1977 sebanyak 29 kursi. Hasil Golkar dalam Pemilu 1971 sebanyak 236 kursi, kemudian dalam Pemilu 1977 meraih-kursi sebanyak 232.

Pemerintah Daerah, Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya serta Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu 1977.

Masalah basis dukungan yang berbeda-beda yang memungkinkan akan menimbulkan konflik interen partai, pada waktu itu tidak sampai muncul kepermukaan karena tiap unsur diakui keberadaannya. NU sebagai unsur terbesar dimana pada waktu Pemilu 1971 berhasil menjadi big two setelah Golkar, nampaknya mengambil peranan penting dan cukup besar dalam proses kelahiran PPP. Hal itu dapat dilihat pada kasus pemberian lambang Ka'bah⁵⁴ pada partai itu dan dapat dilihat pula pada struktur dan personalia kepengurusannya.⁵⁵ Kenyataan itu bisa terjadi karena para pemimpin keempat partai itu bersepakat bahwa penggabungan tidak akan menghilangkan eksistensi masing-masing unsur. Oleh karenanya NU sebagai unsur terbesar mendapatkan kepemimpinan yang cukup terhormat.

Suasana itu agaknya dihayati benar oleh para pemimpin PPP ketika berlangsungnya Munas Dewan Partai pada tahun 1975, sehingga mereka menyepakati apa yang terkenal dengan Konsensus Munas 1975, suatu patokan

⁵⁴ Konon tanda gambar Ka'bah itu adalah hasil KH. Bisri Syamsuri, Ketua Majelis Syura PPP dan Rais 'AM NU melakukan sembayang istikharah. Dengan demikian hal - itu memantapkan hati pimpinan PPP untuk memakai gambar Ka'bah dalam Pemilu 1977. TEMPO, 22 Nopember 1975, hal. 5.

⁵⁵ Struktur kepengurusan PPP banyak persamaannya - dengan struktur kepengurusan NU, hal itu dapat dibuktikan dengan membandingkan antara keduanya. Sedangkan personalianya dapat disebut sebagai berikut : Rais 'AM Majelis Syura KH. Bisri Syamsuri, Wakilnya KHM. Dachlan, - Majelis Pertimbangan Pusat KH. Masykur menjadi Ketua Umum, sedang Presiden Partai KH. Idham Khalid, mereka adalah tokoh-tokoh NU.

dan kriteria yang mereka sepakati untuk menjaga dan me-
magari terjadinya rebutan kursi hasil Pemilu. Dalam
Konsensus itu juga dinyatakan himbauan dalam rangka-
persatuan dan ukhuwah Islamiyah, agar dalam pembagian
hasil Pemilu 1977 nanti, pihak yang besar tidak menun-
tut tambahan secara mutlak, tapi rela memberi satu-dua
kursi bagi unsur yang lebih kecil. Hal itu bisa dilihat
pada kasus pembagian kursi hasil Pemilu 1977 sebagai
berikut : MI (Parmusi) mengalami kenaikan dari 24 men-
jadi 25 kursi, SI (PSII) mengalami kenaikan dari 10 -
menjadi 14 kursi, Perti juga bertambah dari 2 menjadi
4 kursi, sedangkan NU mengalami kekurangan dari 58 men-
jadi 56 kursi.⁵⁶

Kekompakan dan keutuhan dalam tubuh PPP itu ma-
sih dirasakan dalam sidang umum MPR 1978, yaitu ketika
menghadapi masalah aliran kebatinan dan P4. Mereka ke-
lihatan kompak dalam memberikan sikap politiknya, yaitu
walk out sebagai pernyataan tidak ikut bertanggung ja-
wab atas diambilnya keputusan mengenai kedua masalah -
tersebut.⁵⁷ Namun setelah itu benih-benih sengketa di
tubuh PPP mulai muncul, hal itu terasa ketika mereka -
menghadapi pembahasan mengenai RUU Pemilu yang merupa-
kan perubahan dari Undang-Undang No. 4/1975 tentang
Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat. Pembahasan RUU itu berlangsung sekitar setengah
tahun (September 1979 sampai Maret 1980) dan telah ber-
jalan dengan tidak lancar.

⁵⁶ Slamet Effendi Yusuf dkk., Op. Cit., hal. 64.

⁵⁷ TEMPO, 29 Desember 1984, hal. 13.

Setelah melalui pembahasan demi pembahasan RUU Pemilu itu akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang ~~de~~ cara aklamasi meskipun tanpa kehadiran unsur NU yang menganggap FPP sampai saat pengesahan itu belum mencapai keputusan untuk menyetujui materi RUU itu. Sementara unsur-unsur yang lain menganggap sudah ada keputusan dari DPP PPP untuk menerima rumusan RUU Pemilu melalui surat yang ditanda tangani oleh KH. DR. Idham - Khalid, DR. HJ. Naro, KH. Masykur dan Yahya Ubaid. Ketidakhadiran kelompok NU dalam FPP pada Sidang Pleno DPR pada tanggal 29 Pebruari 1980 yang akan mengesahkan RUU Pemilu itu adalah karena mereka berpendapat bahwa beberapa materi yang prinsipil belum tertuang dalam RUU itu.⁵⁸

Tidak adanya kekompakan dalam tubuh PPP mengenai RUU Pemilu itu, dilihat dari sisi lain adalah karena tidak hadirnya tokoh sentral pemberi rekomendasi moral pemberi keputusan politik dan tokoh pemersatu.⁵⁹ Tokoh tersebut adalah KH. Bisri Syamsuri, beliau menjabat Rais 'Am Majlis Syura PPP. Kehadiran KH. Bisri Syamsuri diantara tokoh-tokoh teras PPP setidak-tidaknya telah menimbulkan keengganan untuk bertikai secara berkepanjangan. Hal itu dapat dibuktikan bahwa kasus perpecahan itu terjadi setelah KH. Bisri Syamsuri meninggal -

⁵⁸TEMPO, 8 Maret 1980

⁵⁹Tidak Munculnya KH. Bisri Syamsuri di tengah-tengah tokoh PPP yang sedang berselisih itu karena beliau sedang sakit di Denanyar Jombang, sehingga ia tidak sepenuhnya sempat mengikuti perkembangan di Jakarta. Sakit yang dideritanya akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia pada tanggal 25 April 1980.

dunia, sedangkan sebelumnya keretakan-keretakan dalam tubuh PPP masih terjaga,⁶⁰

Hal itu tercermin pula pada perkataan KH. Shohib Bisri (putera KH. Bisri Syansuri) yang mengatakan bahwa seandainya KH. Bisri Syansuri ada di Jakarta niscaya tidak akan terjadi peristiwa seperti menjelang pengesahan RUU Pemilu tersebut. Pasti tidak ada yang akan berani slintat-slintut (nyelonong secara sembunyi), sebab suatu hal yang prinsip harus diputuskan lewat Majelis Syura. Kalau toh harus ada yang menghadap Presiden, maka Mbah Bisri sendiri yang akan menghadap dan hasilnya bisa lain, ucap KH. Shohib.⁶¹

Perbedaan pendapat antara unsur NU dan unsur-unsur lain dalam PPP mengenai RUU Pemilu itu kemudian dianggap selesai dan tidak dipermasalahkan lagi, melalui pengumuman rujuk tanggal 6 Maret 1980 di Hotel Sahid Jaya, namun penyelesaian itu agaknya hanya sementara. Majalah "TEMPO" menyebut penyelesaian itu sebagai akhir babak pertama dari pertikaian yang masih akan berlanjut.⁶² Hal itu dapat dilihat pada kasus-kasus selanjutnya.

Dalam perkembangan selanjutnya sederetan masalah yang sering dipersengketakan diantara tokoh-tokoh PPP ialah pendapat dalam menilai hakekat fusi, tentang Muk-tamar yang berlangsung lamatertunda, tentang mekanisme kerja DPP, tak ketinggalan soal pembagian kursi baik mengenai komposisi keanggotaan DPR dalam Pemilihan Umum maupun mengenai pimpinan komisi di lembaga wakil

⁶⁰ Wawancara dengan Yusuf Hasyim, 20 Juni 1986, di Jombang.

⁶¹ TEMPO, 15 Maret 1980.

⁶² I b i d.

rakyat itu dan beberapa masalah lainnya. Dari sederetan masalah itu sering meletup kepermukaan adalah masalah rebutan kursi baik di DPR maupun di kepengurusan PPP sendiri, yang banyak didominasi unsur NU dan MI.

Kasus pertikaian selanjutnya adalah mengenai masalah pimpinan komisi di DPR yang menjadi jatah Fraksi Persatuan Pembangunan. Ceritanya bermula ketika DPR mengadakan pemilihan pimpinan Komisi untuk tahun persidangan 1980/1981. Dalam menghadapi pemilihan tersebut, NU bermaksud mengambil jatah Ketua Komisi VII,⁶³ yang menjadi haknya, dimana dalam tahun persidangan 1979/80 dipinjamkan kepada Drs. Sudarji (MI). Namun Sudarji menolak mengembalikan pimpinan Komisi tersebut Kepada NU meskipun sudah ada permufakatan. Sikap MI inilah oleh NU dianggap tidak mentaati keputusan rapat pleno fraksi.⁶⁴ Kasus itu akhirnya meluas kesemua komisi lainnya yang menjadi FPP, kemudian pada setiap pemilihan pimpinan Komisi selalu tampil dengan calon ganda, sehingga untuk beberapa saat jabatan pimpinan komisi dari FPP sempat mengalami kekosongan. Namun kekosongan itu akhirnya juga terisi, dengan NU kehilangan satu kursi pimpinan Komisi sedangkan MI bertambah satu kursi.⁶⁵

Kericuhan antara unsur NU-MI terulang kembali ketika menjelang Pemilu 1982, yaitu mengenai pencalonan keanggotaan DPR. Kelompok MI yang dimotori oleh Sudar

⁶³ Komisi VII membidangi masalah Perdagangan, Keuangan dan Bulog.

⁶⁴ HA. Basit Adnan, Ada Apa di PPP ?, CV. Mayasari, Sala, 1982, hal. 37-38.

⁶⁵ Slamet Effendi Yusuf dkk., Op. Cit., hal 69-70.

ji menghendaki perimbangan komposisi wakil unsur dalam DPR hasil Pemilu 1982. Menurutnya, dengan berdasarkan perimbangan yang ada sekarang, ada unsur mayoritas dan minoritas, karenanya MI menuntut agar perimbangan komposisi wakil unsur dalam DPR didasarkan atas hasil Pemilu 1955 bukan Pemilu 1971.⁶⁶ Kelompok NU tentu saja tidak dapat menerima tuntutan MI itu dan NU tetap mempertahankan Konsensus Munas 1975 agar tetap dipakai untuk menentukan pencalonan anggota DPR sebelum dilangsungkan Mukhtamar.

Sebagai akibat dari perselisihan itu adalah tidak dapat diselesaikannya daftar calon sementara dari pihak PPP sampai batas akhir. Situasi ini memberikan kesempatan bagi HJ. Naro untuk mengambil jalan pintas, menyusun sendiri daftar calon PPP sekaligus menentukan nomor urutan calon tanpa konsultasi dengan unsur-unsur lainnya terutama NU. Sekjen PBNU dalam keterangannya mengatakan bahwa "daftar urutan calon keanggotaan DPR dari PPP yang diserahkan 27 Oktober 1981 yang lalu oleh Naro itu tanpa sepengetahuan unsur NU".⁶⁷ Tindakan Naro itu tentu saja tidak bisa diterima oleh sejumlah tokoh-tokoh PPP dari unsur NU karena dalam daftar urutan calon itu tokoh-tokoh NU yang diharapkan menjadi calon jadi, akhirnya banyak menempati nomor tidak jadi. Maksum Machfudz mengatakan ada 29 tokoh NU yang mengalami

⁶⁶ Tuntutan MI itu beralasan bahwa dalam Pemilu 1977, MI belum siap mengkonsolidasikan keluarga besar Bulan Bintang Masyumi, yang dalam Pemilu 1955 keluar sebagai partai terbesar. Jelasnya MI meng-claim bahwa mereka adalah pewaris keluarga besar Bulan Bintang.

⁶⁷ Sinar Harapan, 10 Nopember 1981. Juga lihat : Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Jatayu, Sala, 1985, hal. 279.

nasib seperti itu.⁶⁸

Sejumlah tokoh PPP yang tidak bisa menerima tin dakan Naro itu, akhirnya mendatangi Kantor Lembaga Pe milihan Umum dengan maksud menyerahkan daftar calon tandingan.⁶⁹ Akan tetapi daftar calon itu tidak ada yang menerima di LPU, dan setelah diumumkan daftar ca lon anggota DPR untuk PPP maka ternyata yang diterima adalah daftar calon yang disampaikan HJ. Naro dan di anggap sah menurut hukum.⁷⁰ Dengan kasus di atas keme lut dalam tubuh PPP semakin meningkat dan memuncak, bu kan hanya terjadi antara unsur didalam PPP, tapi juga merambat ke interen unsur. Kasus itu pula telah menye babkan unsur NU kecewa dan frustrasi, sehingga sejak saat itu mereka mulai memperhitungkan untung-rugi ke terlibatannya dalam PPP.⁷¹

Dengan tubuh yang retak dan tanpa persiapan yang matang, akhirnya PPP juga ikut Pemilu 1982, sepe ti apa yang dikatakan KH. Saifuddin Zuhri bahwa PPP maju dalam Pemilu 1982 dengan tangan telanjang, sedang kan kontestan lain (GOLKAR) siap ke gelanggang lengkap dengan tema-tema kampanye dengan sasaran dan strategi yang matang. Sebagai akibat keretakan itu dan ketidak siapan dalam menghadapi Pemilu 1982, maka PPP mengalami

⁶⁸ Maksud Mahfudz, Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Yayasan Kesatuan Umat, Surabaya, 1982, hal. 281

⁶⁹ Mereka itu adalah HM. Yusuf Hasyim anggota DPP PPP dari unsur NU dan Djalil Abdullah ketua DPP PPP da ri unsur MI.

⁷⁰ Kompas, 28 Oktober 1981.

⁷¹ Majalah Dakwah, No. 4 Tahun ke II 1982, hal. 15.

kekalahan dengan kehilangan lima kursi di DPR.⁷²

Dalam keberadaannya sebagaimana dimaksudkan di atas PPP dalam Sidang Umum 1983 terpaksa menghilangkan ciri khasnya "Islam", setelah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian PPP telah berubah eksistensinya sebagaimana dikatakan oleh Khalid Mawardi bahwa "PPP bukan partai Islam tetapi partainya orang Islam".⁷³ Disisi lain dapat pula disebutkan sebagai terminal akhir perjalanan-parjalanan partai Islam, setelah melalui perjalanan sejarahnya yang panjang dan berliku-liku.

Muktamar PPP yang sudah lama ditunggu-tunggu baru dapat dilaksanakan setelah partai itu berumur sebelas tahun, yaitu tepatnya tanggal 20-22 Agustus 1984.⁷⁴ Dilihat dari sisi lain, terlaksananya Muktamar itu adalah HJ. Naro dan kelompoknya sudah kuat posisinya, dimana mereka telah berhasil menyingkirkan kelompok oposisinya, termasuk orang-orang NU. Hal itu dapat dilihat pada kasus undangan peserta Muktamar. Undangan peserta Muktamar itu adalah orang-orang yang jelas mendukungnya jadi peserta Muktamar itu ditentukan dari pusat bukan berdasarkan utusan daerah.⁷⁵

Model Muktamar sebagaimana dijelaskan di atas - tampak dengan jelas menguntungkan HJ. Naro, karena yang hadir dalam Muktamar itu adalah pendukungnya semua. se

⁷²Panji Masyarakat, 21 Juni 1982, hal. 17.

⁷³Panji Masyarakat, 21 Maret 1983, hal. 51-52.

⁷⁴Rekaman Peristiwa, Sinar Harapan, Jakarta, 1984 hal. 78.

⁷⁵I b i d., hal. 78.

sehingga pada waktu HJ. Naro memasuki ruangan disambut dengan nyanyian " Hallo-hallo Bandung " oleh semua yang hadir dan setelah Muktamar berjalan beberapa menit dia langsung terpilih sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan DPP PPP periode 1984-1989.⁷⁶ HJ. Naro yang terpilih sebagai formatur tunggal dengan mudah dapat menyeleksi para pembantunya dan dia mengatakan - " Di sini diperlukan para pembantu yang selalu memiliki moral komunikasi ".⁷⁷ Dia sebagai formatur tunggal telah berhasil merombak hal yang mendasar yaitu menghapus adanya lembaga Presiden Partai dan Majelis Syura, dimana pada waktu dulu diduduki oleh tokoh-tokoh NU. Dia telah berhasil menyingkirkan ulama NU dari kepengurusan DPP PPP 1984-1989, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahid bahwa " NU memang babak belur, kalah total dari MI. Lihat saja 12 dibanding 23 ", ujarnya.⁷⁸

Sengketa demi sengketa telah berlangsung antara unsur NU dan MI di dalam PPP, dan banyak berakhir dengan terpojoknya dan tersingkirnya para pemimpin NU baik dari keanggotaan DPR maupun dari kepengurusan partai itu. Dengan beberapa kasus di atas, maka pemikiran peninjauan kembali keberadaan NU di dalam PPP tambah dibicarakan dengan hangat. Muktamar NU ke-27 tanggal 8-12 Desember 1984 di Situbondo telah mengambil sikap - tentang keberadaan NU, yaitu dengan pernyataan bahwa - NU kembali ke Khittah 1926.⁷⁹ Dengan demikian NU tidak

⁷⁶TEMPO, 1 September 1984.

⁷⁷I b i d.

⁷⁸I b i d.

⁷⁹TEMPO, 15 Desember 1984, hal. 12. Lihat juga Panji Masyarakat, 1 Januari 1984, hal. 14-15.

lagi terlibat dalam masalah politik, jelasnya NU sebagai organisasi telah keluar dari PPP,⁸⁰ sedangkan keanggotaan Parpol bersifat perorangan, warga NU bebas menentukan pilihannya.⁸¹

Langkah NU itu akhirnya diikuti unsur lainnya yang mempunyai latar belakang sama yaitu Perti.⁸² Dengan demikian, PPP yang pada awalnya merupakan wadah pemer-satu aspirasi politik Islam telah mengalami perpecahan sehingga keberadaannya tidak utuh lagi. Hal itu menunjukkan pula bahwa integrasi kekuatan politik Islam dalam era Orde Baru telah mengalami kegagalan. Walaupun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa dengan keluarnya unsur-unsur itu dari PPP berarti penggabungan keempat partai Islam telah tuntas, karena yang menjadi unsur sekarang adalah perorangan. Namun tampaknya pendapat itu hanya berusaha mempertahankan keberadaan PPP dari kepunahan, dimana PPP memang tidak mungkin bubar, karena keberadaannya sudah diatur oleh Undang-Undang - Kepartaian yang berlaku. Disisi lain pendapat itu untuk mempertahankan posisi-posisi perorangan, dimana mata pencaharian mereka bersumber dari kursi DPR yang diperoleh melalui partai.

Apapun pendapat orang tentang PPP, yang jelas PPP sekarang adalah ujud integrasi kekuatan politik Islam yang tidak berhasil.

⁸⁰ Majalah Disma, hal 11-30.

⁸¹ TEMPO, 8 Desember 1984, hal. 13, keterangan selengkapnya lihat, Rekaman Peristiwa 1984, hal. 224-228.

⁸² Jawa Post, 17 Desember 1985, hal. 6.